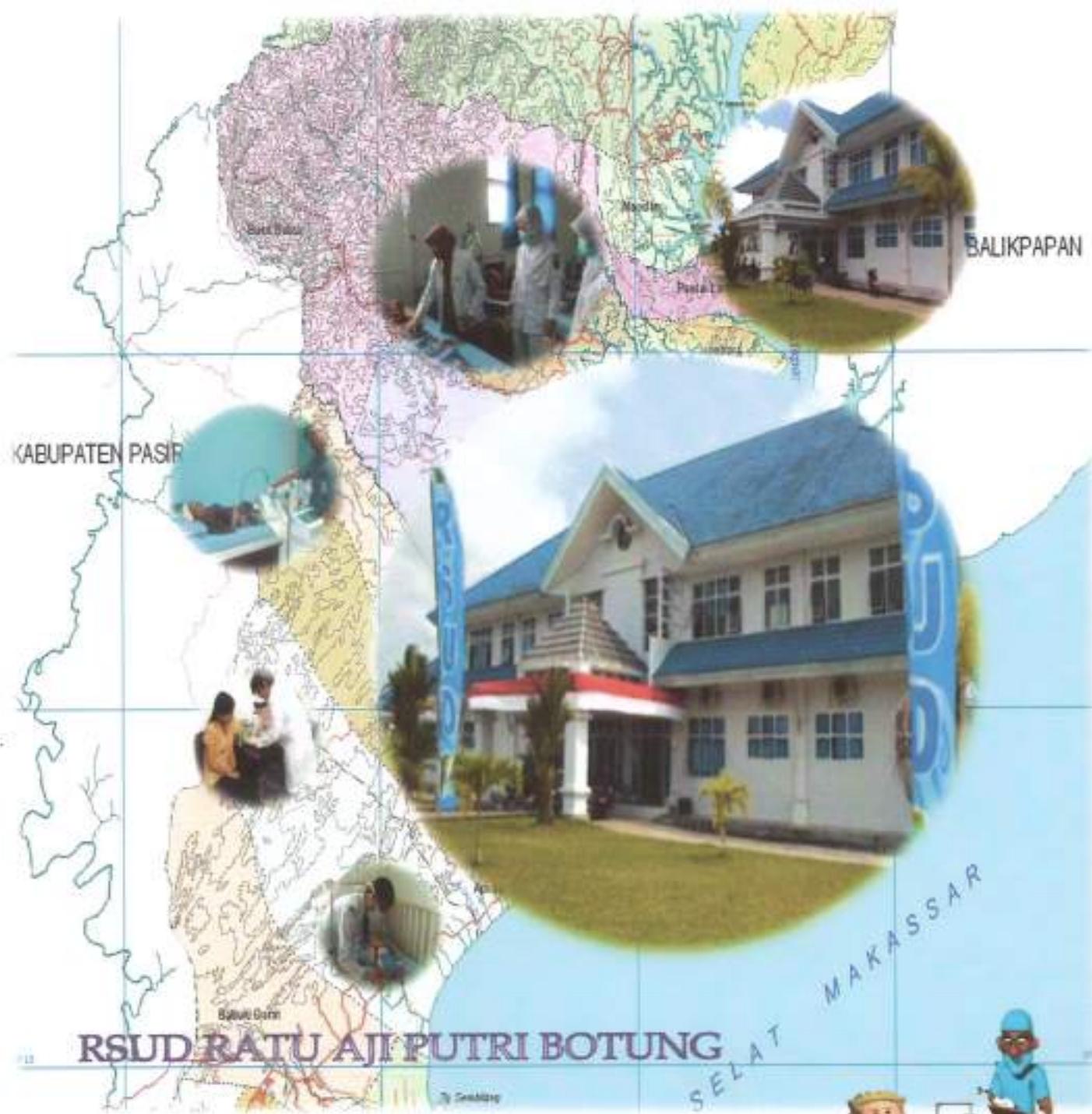




# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



Jln. Propinsi KM.9 Telp (0542) 7211361 Kab. Penajam Paser Utara





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	1
BAB I .PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II . GAMBARAN PELAYANAN RSUD RAPB .....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas Pokok .....	13
2.2 Sumber Daya SKPD .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD RAPB .....	25
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran RSUD RAPB .....	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	30
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....	31
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	33
BAB VIII. PENUTUP .....	36
Lampiran -lampiran	





LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS BLU  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2024-2026**

Anggota

**Muhammadi, SE, S.Kom, M.Ling**  
NIP. 198301052003122004

Penajam, 12 Januari 2023

Menyetujui;

Ketua

Dewan Pengawas

**Drs. H. Tohar, MM**  
NIP. 196807081990101001





## KATA PENGANTAR

Menyikapi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Selain itu pula diarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada good governance dan clean governance dimana keterlibatan semua pihak baik pemerintah, sektor publik maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan.

Demi mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. Pemerintah yang baik dan bersih memiliki ciri – ciri efisien, efektif demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel dan berlandaskan kerangka hukum yang fair.

Pembangunan di Bidang Kesehatan dititikberatkan melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pencapaian keseluruhan sasaran dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030.

Rumah Sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban dan tanggungjawab, masalah dan harapan yang digantungkan padanya.

Rumah Sakit dapat dianalogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang saat ini berubah dengan cepat, sehingga membutuhkan perencaraan strategis untuk menjadi pedoman dan arahan bagi kinerja rumah sakit.

Renstra SKPD RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 merupakan landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan).





Tak lupa kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan renstra ini masih banyak kekurangan dan kelemahan , oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

*Terima kasih....*

Penajam, 12 Januari 2023

Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung

 Kab. Penajam Paser Utara

dr. Lukasiwan Eddy Saputro  
NIP. 197803112005021005





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Seiring akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah 208-2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diwajibkan untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten (RPD) Tahun 2024-2026 serta selanjutnya memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun RENSTRA tahun 2024-2026 hingga terpilihnya Kepala Daerah yang baru.

Untuk itu sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, RSUD Ratu Aji Putri Botung mempunyai kewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2024-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD Ratu Aji Putri Botung selama kurun waktu tiga tahun kedepan dimana diharapkan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Dokumen ini akan menjadi acuan RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis, karena rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan bidang kesehatan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.





Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

1. Upaya kesehatan,
2. Pembiayaan kesehatan,
3. Sumber daya manusia kesehatan,
4. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan,
5. Manajemen dan informasi kesehatan, dan
6. Pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Derajat Kesehatan Masyarakat sangat ditunjang dengan Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pembangunan Derajat kesehatan Masyarakat yakni Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang lazim dikenal sebagai Puskesmas, Klinik Kesehatan dimana memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Baik Itu Kuratif, Promotif dan Preventif. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dalam hal ini adalah Rumah Sakit dimana memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan pada kedua Fasilitas Kesehatan ini sangat menunjang Pembangunan Derajat Kesehatan Masyarakat yang nantinya akan berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat/Masyarakat.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara di dirikan pada Awal September 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 11 tahun 2003 dan Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor 641/14/Pemb-IMB/IV/2007 tertanggal 19 April 2007 serta mulai uji coba operasional bernomor : 503/4214/PSTK-2/XI/2007 tertanggal : 8 November 2007 dan pada tanggal 21 Juli 2008 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor : 07.06/III/2757/2008 tentang : Pemberian Ijin Penyelenggaraan RSUD Ratu Aji Putri Botung Dengan nama : RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan





Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, kemudian pada tahun 2017 RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara telah berubah dengan nama RSUD Ratu Aji Putri Botung terhitung mulai tanggal 12 Mei 2017.

Sebagai Institusi pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistik mengantisipasi perkembangan masa depan. Sebagai bagian dari salah satu SKPD, maka perlu mempunyai perencanaan jangka menengah atau rencana 3 tahun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah memberikan arahan dalam mengembangkan rumah sakit 3 tahun kedepan.

Dalam Proses Penyusunan Rencana Strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 melibatkan seluruh bidang-bidang yang ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023, mengingat setiap bidang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis urusan masing-masing bidang.

Rencana Strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini didasarkan pada revisi RPJMD Kabupaten PPU 2019-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Renstra RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara 2013- 2018 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten penajam Paser Utara yang sedang berjalan.

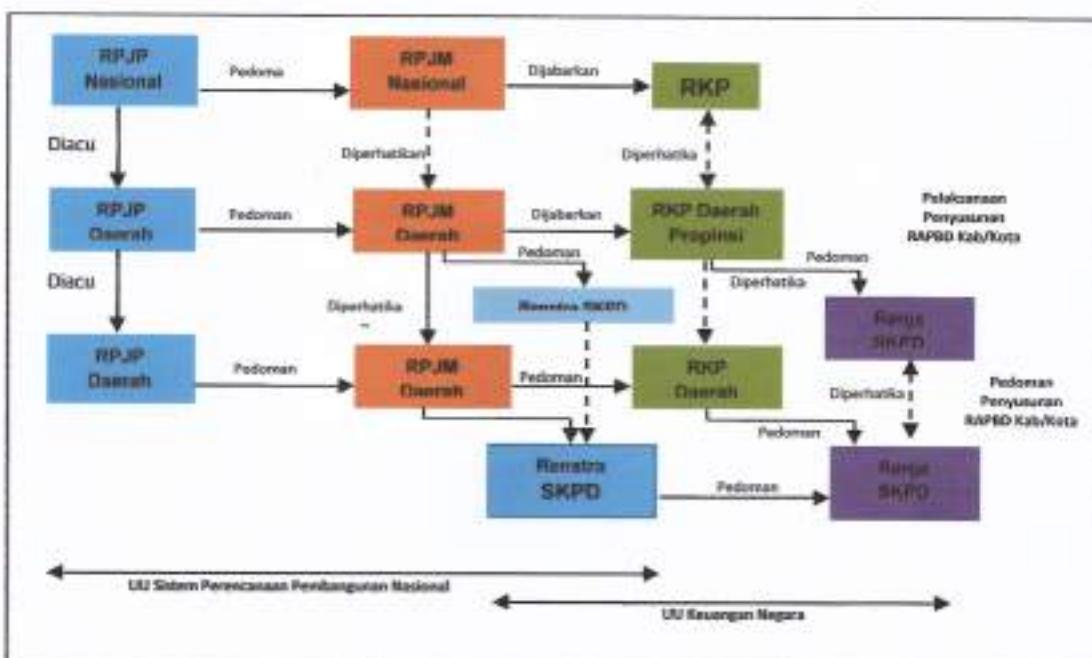
Dokumen RENSTRA RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Paser Utara disusun berdasarkan pada fungsi RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Paser Utara sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan sehingga agenda prioritas Penajam Paser Utara Sehat dapat terwujud. Penyusunan RENSTRA RSUD Ratu Aji Putri Botung





Kabupaten Penajam Paser Utara melalui berbagai tahapan mulai pengumpulan data primer/ skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi, perumusan rancangan RENSTRA.

Gambar.1  
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 Thn 2001



#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaga negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 20, Tambahan lembaga negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;





7. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka





Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaga Daerah Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaga Daerah nomor 6);
25. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPjPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 – 2031;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.
29. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
30. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 11 tahun 2003 dan Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor 641/14/Pemb-IMB/IV/2007





tertanggal 19 April 2007 serta mulai uji coba operasional bernomor : 503/4214/PSTK-2/XI/2007 tertanggal : 8 November 2008

37. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor : 07.06/III/2757/2008 tentang : Pemberian Ijin Penyelenggaraan RSUD Ratu Aji Putri Botung Dengan nama : RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur
38. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor 641/14/Pemb-IMB/IV/2007 tertanggal 19 April 2007 serta mulai uji coba operasional nomor : 503/4214/PSTK-2/XI/2007 tertanggal : 8 November 2007
39. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 445/317/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Operasional RSUD Ratu Aji Putri Botung Kepada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara;
40. Kepmenkes Nomor 074 / MenKes / SK / 1 / 2010 pada Tahun 2010 tentang penetapan Tipe C RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara
42. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.
43. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara.
44. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara no : 445/206/2011 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah pada RSUD Kab. PPU.
45. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 130/171/2017 tentang Pemberian Nama Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah :

- a. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Gambaran tentang hubungan serta keterkaitan Renstra RSUD Ratu Aji Putri Botung dengan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara;





- c. Gambaran RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki;
- d. Keadaan kinerja pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung berupa capaian kinerja pada Renstra tahun 2018 - 2023 serta menganalisis tantangan dan peluang SKPD untuk tiga tahun ke depan;
- e. Menyamakan persepsi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra Propinsi, Visi Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Sustainable Developmental Goals (SDGs) sehingga bisa merumuskan isu-isu strategis.
- f. Merumuskan Perencanaan Strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung Paser Utara yang berisikan Visi dan Misi, Prioritas Pembangunan yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Strategis, Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Memaparkan program kerja dan kegiatan RSUD Ratu Aji Putri Botung serta pendanaannya untuk periode 2024-2026.
- h. Sebagai arahan dalam pengembangan Rumah Sakit menjadi rumah sakit yang menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan khususnya Rumah Sakit secara maksimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.
- i. Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsinya.

Tujuan dari Rencana strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah :

- a. Menjabarkan Strategis yang akan dilaksanakan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi RSUD Ratu Aji Putri Botung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan kesehatan.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung
- d. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Penajam Paser Utara sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 ini disusun ke dalam 8 (delapan) bab berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:





Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

**Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** : Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk SPM sesuai dengan tupoksinya) dan Kelompok sasaran layanan.

**Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**: Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan capaian kinerja dan isu Strategis

**Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**: Dalam Bab ini dirumuskan

- a. Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan :
  - Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026
  - Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- b. Cascading kinerja mulai dari tujuan sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**: Dalam Bab ini akan dikemukakan perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** :

Pada Bab ini dikemukakan Rencana Program program dan kegiatan, sub kegiatan berserta kinerja indicator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhiran)

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** :

Pada Bab ini dikemukakan :

- a. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui indicator utama PD
- b. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui indicator kinerja kunci (IKK), IKK berserta targetnya dikhkususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.





---

**BAB VIII PENUTUP**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Ratu Aji Putri Botung**

RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang didirikan pada awal September 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 11 tahun 2003. Kemudian berganti Nama menjadi RSUD Ratu Aji Putri Botung yang tertuang dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 130/171/2017 tentang pemberian Nama Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumah Sakit ini berada di lokasi strategis tepatnya di jalan Propinsi Km.09 Kelurahan Nipah-nipah, yang merupakan jalan utama propinsi penghubung kota Balikpapan dengan kabupaten Paser.

RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan sebagai rumah sakit tipe C melalui Kepmenkes Nomor 074 / MenKes / SK / I / 2010 pada Tahun 2010.

RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah lembaga teknis yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

1. RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara di dirikan pada Awal September 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 11 tahun 2003
2. Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara Nomor 641/14/Pemb-IMB/IV/2007 tertanggal 19 April 2007 serta mulai uji coba operasional nomor : 503/4214/PSTK-2/XI/2007 tertanggal : 8 November 2007
3. Tanggal 21 Juli 2008 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor : 07.06/III/2757/2008 tentang : Pemberian Ijin Penyelenggaraan RSUD Ratu Aji Putri Botung Dengan nama : RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.





4. Penetapan Rumah Sakit Tipe C yang tertuang dalam Kepmenkes Nomor 074 / MenKes / SK / 1 / 2010 pada Tahun 2010 tentang penetapan Tipe C RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara.

**Tugas :**

RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pengobatan dan rehabilitasi, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

**Fungsi :**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Menyelenggarakan Pelayanan asuhan keperawatan
- d. Menyelenggarakan Pelayanan rujukan medis dan non medis
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, kehumasan dan pemasaran.

**Visi dan Misi**

**Visi :** *"Menjadi rumah sakit yang Modern dan Bermutu, pilihan utama masyarakat Penajam Paser Utara".*

**Misi :**

1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan aman berbasis informasi teknologi
2. Mewujudkan sistem manajemen rumah sakit yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan sumber daya manusia rumah sakit melalui pendidikan, pelatihan dan ibadah





Adapun Penjabaran dari Visi tersebut di atas diuraikan seperti di bawah ini :

1. **Modern**, yang dimaksud adalah merujuk dengan Visi Misi Bupati, maka Rumah Sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan tetap mengikuti perkembangan jaman dan IPTEK terkini
2. **Bermutu**, yang dimaksud adalah Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun Penjabaran dari Misi tersebut di atas diuraikan seperti di bawah ini :

1. Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Aman Berbasis Informasi Teknologi

Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung nantinya diharapkan Responsif dan Tanggap dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien/Masyarakat, Tepat dalam hal ini adalah Tepat Diagnosa dan Tepat Penatalaksanaan, serta dalam memberikan pelayanan kesehatan tetap menjamin kepastian keamanan dalam segala hal produk pelayanan yang ada di RS yang ditopang dengan Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Sistem Manajemen RS yang Akuntabel dan Transparan

Dalam Penyelenggaraan Manajemen RS tetap mengedepankan Aspek Akuntabel dan Transparansi dalam sistem manajemen pemerintahan.

3. Meningkatkan SDM RS Melalui Pendidikan, Pelatihan dan ibadah.

Selain peningkatan mutu pelayanan dan mewujudkan sistem manajemen yang akuntabel, RS juga berupaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan seluruh SDM yang ada di RS melalui program pendidikan dan pelatihan. Selain Kompetensi yang dibangun juga mengupayakan peningkatan Kualitas IMTAK seluruh SDM

Pernyataan visi misi rumah sakit tertuang di Tata Kelola Rumah Sakit (Corporate by laws) dan Pedoman pengorganisasian Rumah Sakit.

Struktur Organisasi di bawah ini berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.





Struktur organisasi RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 1 Direktur, 1 Kepala Bagian, 3 Kepala Bidang, 3 Kepala sub bagian dan 6 kepala seksi serta Satuan Pengawas Intern, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung
- ❖ Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Humas
- ❖ Bidang Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi :
  - a. Seksi Penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi
  - b. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit
- ❖ Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan medik dan Penunjang medik
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Medik dan Penunjang Medik
- ❖ Bidang Perawatan, membawahi :
  - a. Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan
  - b. Seksi Etika Mutu Keperawatan dan Etika Profesi Keperawatan
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - a. Satuan Pengawas Intern
  - b. Komite Medik
  - c. Komite Keperawatan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan.

Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 14 Desember 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara serta berdasarkan PERBUP Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 11 September 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun susunan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD terdiri dari :

- a. Direktur
- Tugas :
- melaksanakan kegiatan kepemimpinan, mengarahkan, membimbing, membina, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengorganisasikan, menyusun kebijakan, dan mengawasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan RSUD sesuai





dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Fungsi :

- Perumusan sasaran kebijakan pengelolaan Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Perawatan dan Bidang Perencanaan Rekam Medik yang berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan tugas
- Penetapan rencana program RSUD dengan berpedoman kepada rencana strategis pemerintah daerah guna terwujudnya visi dan misi daerah.
- Pendistribusian tugas kepada bawahan agar tugas dapat terselesaikan dengan baik
- Pengkoordinasian kinerja bawahan dalam proses pengelolaan Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Perawatan dan Bidang Perencanaan Rekam Medik.
- Penyelenggaraan dan memantau pelaksanaan program dengan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengevaluasian pengelolaan Bagian Tata Usaha, Bidang Medik, Bidang Non Medik, dan Bidang Perawatan untuk dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara tertulis maupun secara lisan melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan penilaian dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan.

#### PEJABAT STRUKTURAL

1. Direktur Rumah Sakit : dr. Lukasiwan Eddy Saputro
2. Ka. Bag Tata Usaha : H. Hidayatul Rakhim, S.Sos
  - ❖ Ka. Subbag Umum & Kepegawaian : Elia Mawarni, SE
  - ❖ Ka. Subbag Keuangan : M. Muslaini, ST,MH
  - ❖ Ka. Subbag Hukum, Humas & Pemasaran (plt)
3. Ka.Bid Perencanaan & Rekam Medik : Surati, S.ST
  - ❖ Ka. Sie Penyusunan Program, Pelaporan & Evaluasi
  - ❖ Ka. Sie Rekam Medik & Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
4. Ka.Bid Pelayanan Medis : Marlati,S.Kep,NS
  - ❖ Ka. Sie Pelayanan & Penunjang medik, Rawat Jalan,





**Rawat Inap & Rawat Darurat**

- ❖ Ka.Sie Pengawasan, Pengendalian & : Wawan Suharsono, S.Komp
- Penunjang Medik, Penerimaan &
- Pemulangan Pasien

5. Ka.Bid Perawatan : Syahrial Hidayat,S.Kep
- ❖ Ka. Sie Asuhan Pelayanan Keperawatan : Tutut Purwanti, S.ST,MM
  - ❖ Ka. Sie Mutu & Etika Profesi Keperawatan : Anita, A.md,Kep

**2.2. Sumber Daya RSUD Ratu Aji Putri Botung**

Sedangkan di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 memiliki tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari :

**Tabel.1**  
Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUD Ratu Aji Putri Botung  
Tahun 2022

**KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT**

**4. Jumlah Sumber Daya Manusia RSUD**

1	PNS	308
2	THL	324
3	Kontrak BLUD	10

**4. Jumlah Tenaga Kesehatan di RS 2022**

1	Dokter spesialis	27
2	Dokter umum	18
3	Dokter Gigi	3
4	Nutrisionis	7
6	Perawat	179
7	Bidan	84
8	Sanitarian	5
9	Apoteker	11
10	Asisten Apoteker	20
11	Asisten Penata Anaestesi	1
12	Analis Laboratorium	16
13	Fisioterapi	6
14	Rekam Medik	6
15	Teknisi Elektromagnetik	6





16	Radiografer	11
17	Terapis Gigi	4
18	Administrator Kesehatan	1
19	Pranata Komputer	2
20	Pranata Humas	1
21	Analis Kepegawaian	1
22	Arsiparis	2
23	Penyusun Abstarksi Hukum	1
24	Analis Hukum	1
25	Penyusun Rencana Kebutuhan RT dan Perlengkapan	1
26	Penata Laporan Keuangan	2
27	Verifikator keuangan	3
28	Pengadministrasi Kepegawaian	1
29	Pengelola sarana dan Prasarana Kantor	1

Berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Manusia di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara ketersediaan dokter spesialis yang ada sampai saat ini sebagai berikut :

**Tabel.2**  
Jumlah Dokter Spesialis di RSUD Ratu Aji Putri Botung  
Tahun 2022

NO	DOKTER SPESIALIS	PNS	KONTRAK/WKDS
1	Spesialis Anak	1	-
2	Spesialis Penyakit Dalam (Internis)	1	1
3	Spesialis Obgyn	3	-
4	Spesialis Paru	2	-
5	Spesialis Bedah	2	-
6	Spesialis Bedah Mulut	1	-
7	Spesialis Penyakit Mulut	1	-
8	Spesialis Saraf	-	1
9	Spesialis Mata	1	-
10	Spesialis Patologi Anatomi	2	-
11	Spesialis Patologi Klinis	2	1
12	Spesialis Anaestesi	1	1
13	Spesialis Radiologi	2	-





14	Spesialis Mikrobiologi	1
15	Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	1
16	Spesialis THT	1
17	Spesialis Jantung	1
18	Spesialis Jiwa	1

a. **Sarana & Prasarana (Gedung/Bangunan)**

Rumah Sakit terdiri dari beberapa bangunan/gedung yaitu :

- Gedung Administrasi yang terdiri dari 2 lantai dengan luas  $\pm 1422,00 \text{ M}^2$
- Gedung IGD & Radiologi yang terdiri dari 1 dengan luas  $\pm 960,84 \text{ M}^2$
- Gedung perawatan kelas III dan Penyakit Menular yang terdiri dari 1 dengan luas  $540,00 \text{ M}^2$
- Gedung perawatan kelas I dan II
- Gedung VIP
- Gedung CSSD dan Gedung ICU
- Gedung OK
- Gedung Serba Guna
- Mushola
- Pos Keamanan
- Gedung Dapur dan Laundry yang terdiri dari 1 dengan luas  $432,00 \text{ m}^2$
- Ruang jenazah yang terdiri dari 1 dengan luas  $186,00 \text{ m}^2$
- Rumah genset yang terdiri dari 1 dengan luas  $275,00 \text{ m}^2$
- Rumah Tandon yang terdiri dari 1 dengan luas  $90,00 \text{ m}^2$
- Waste Water Treatment Plan yang terdiri dari 1 dengan luas  $44,70 \text{ m}^2$

Berdasarkan ketersediaan Sarana dan Prasarana di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada sampai saat ini baik masih terdapat kekurangan.

**2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung**

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu : tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelayanan Rumah Sakit, yang paling sering digunakan adalah : BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR.





Data Keadaan Tahun 2022 BOR, LOS, BTO, TOI, GDR, NDR, Jumlah Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai berikut :

- a. Bed Occupancy Rate (BOR) Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap adalah 51,32% dengan BOR tertinggi terjadi pada kelas III. Angka ini masih berada jauh dalam nilai parameter BOR ideal yaitu 60-85%, yang artinya pemakaian tempat tidur untuk periode 1 tahun terakhir belum memadai.
- b. Length of Stay (LOS) Adalah tingkat lamanya perawatan pasien. Rata-rata lama rawatan seorang pasien adalah 2,23 hari. Angka ini masih dibawah parameter ideal yaitu 6-9 hari, yang artinya lama pasien dirawat rata-rata kurang efisien, karena adanya faktor beberapa pasien yang masih mau dirawat walaupun diizinkan untuk pulang.
- c. Bed Turn Over (BTO) Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur adalah 63,26 kali. Angka ini masih diatas angka ideal. Idealnya selama satu tahun, 1 tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali, yang artinya frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit untuk periode 1 tahun terakhir kurang efisien.
- d. Turn Over Interval (TOI) Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat samapi terisi berikutnya. Rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya adalah 4,41 hari. Angka ini di atas ideal karena idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari, artinya rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya cukup.
- e. Net Death Rate (NDR) Rata-rata angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar adalah 13,71. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.
- f. Gross Death Rate (GDR) Rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar adalah 36,68. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir karena masih dibawah nilai GDR tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.
- g. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan adalah sebanyak 41.746 jiwa selama Tahun 2022
- h. Jumlah Kunjungan IGD adalah sebanyak 13.585 jiwa selama Tahun 2022.
- i. Jumlah Kunjungan Rawat Inap adalah sebanyak 6.705 jiwa selama Tahun 2022





# RENSTRA

RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG  
2024-2026

Tabel 3  
Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ratu Ajil Putri Botung  
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA RSUD RAPB Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Ratio Capaian Pada Tahun ke-			
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kunjungan rawat jalan	32,000	26,000	33,000	33,000	35,000	27,921	32,723	29,358	26,051	41,746	87,25	125,86	88,96	78,94	119,27	
2	Kunjungan IGD	11,000	11,000	11,000	11,000	9,000	10,903	10,915	8,086	7,794	6,705	99,12	99,23	73,51	70,85	74,50	
3	Kunjungan rawat inap	6,000	6,000	5,000	5,200	5,000	4,604	5,074	5,093	4,434	13,585	76,73	84,57	101,86	85,27	271,70	
4	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit :																
	BOR ( Bed Occupancy Rate )	60	60	60	60	60	33,71	31,82	35,93	38,85	51,23	56,18	53,03	59,88	64,75	85,38	
	LOS (Length Of Stay)	6	6	6	6	6	2,44	2,30	3,60	2,71	2,23	40,67	38,33	60,00	45,17	37,17	
	TOI (Turn Over Interval)	3	3	3	3	3	4,73	4,95	4,65	4,53	4,4	157,67	165	155	151	146,67	
	BTO (Bed Turn Over)	40	40	50	50	50	51,16	50,24	50,43	50,25	63,26	127,90	125,6	100,86	100,50	126,52	
	NDR (Net Death Rate)	7	7	7	10	10	7,82	5,52	12,96	29,93	13,71	111,71	78,86	185,14	299,30	137,10	
	GDR (Gross Death Rate)	12	12	20	20	15,42	13,01	30,43	60,24	36,68	128,50	108,42	253,58	301,2	183,40		



# RENTRA

RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG  
2024-2026

Tabel.4  
Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
RSUD Ratu Aji Putri Botung  
Tahun 2018-2022

No	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	81,335,537,723	84,045,404,158	77,694,073,795	122,472,354,835	107,061,246,435	80,796,547,948	94,252,159,661	77,338,616,163	99,883,135,521	122,270,872,956

Tabel.5  
Capaian Ratio dan Rata - Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi  
RSUD Ratu Aji Putri Botung  
Tahun 2018-2022

NO	Ratio antara Realisasi dan Anggaran			Rata-Rata Pertumbuhan			
	Tahun Ke-			Anggaran (%)	Realisasi (%)		
2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (%)	Realisasi (%)	
1	99	112	99,54	81,56	114,21	8,44	6,47



Khusus untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai rumah sakit Umum kelas C merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah kabupaten Penajam Paser Utara. Kendala sarana & prasarana yang cukup memadai sehingga pasien masih memerlukan rujukan-rujukan ke rumah sakit di kota Balikpapan.

Namun saat ini RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara tengah melakukan pemberahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di tengah persaingan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kinerja layanan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara di atas didukung oleh Program seperti :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan





### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung

#### (Analisis SWOT)

##### Kekuatan (Strength)

1. RSUD Ratu Aji Putri Botung kabupaten Penajam Paser Utara merupakan satu-satunya Rumah Sakit Pemerintah Type C yang ada di Penajam Paser Utara dengan lokasi yang cukup strategis.
2. Sudah adanya sarana dan prasarana bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Ruang Rawat inap, Kamar Oprasi (OK), ICU, CSSD, Hemodialisa, Endoscopy serta penunjang lainnya dan administrasi).
3. Komitmen pemimpin dan manajemen RSUD terhadap pengembangan yang akan membawa perubahan, baik itu perubahan kinerja pegawai ataupun pelayanan kepada masyarakat.
4. Tenaga medis, keperawatan, non medis yang kompeten, ramah dan siap dalam memberikan pelayanan RSUD secara optimal.
5. Memiliki Tenaga Medis Spesialistik yang berpengalaman
6. Terakreditasinya RSUD Ratu Aji Putri Botung versi Starkes yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2023 dengan level tertinggi yakni Paripurna
7. Mendapatkan sumber dana dari pemerintah berupa APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendapatkan sumber dana pelayanan Rumah sakit baik dari pasien umum, kerja sama dan MCU.
8. Sudah terlaksananya SPM RS sebanyak 22 Pelayanan

##### Kelermahan (weakness)

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana khususnya perlunya bangunan baru seperti Bangunan Rawat Inap Kelas I, II, VIP, Rawat Jalan, Gudang arsip, Gudang Obat, Rumah Dinas, Gedung workshop, dan beberapa ruang lainnya seperti Laundry, Gizi/Dapur, Ruang Sanitasi hal ini disebabkan jumlah kunjungan semakin banyak dan jumlah dokter spesialistik semakin bertambah.
2. Masih perlunya perluasan area parkir seiring semakin bertambahnya jumlah kunjungan ke RS





3. Beberapa pelayanan masih ada yang dilaksanakan dibawah standar yang ada karena belum sesuai SOP pelayanan
4. SDM yang ada masih belum semuanya bisa memenuhi standar kepegawaian dan menjadi standar tersebut sebagai budaya kerja, sehingga belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan profesional pelayanan berbasis pada kepuasan pelanggan.
5. Anggaran yang ada masih terpusat berdasarkan skala prioritas
6. Masih minimnya kamar pelayanan yang dimiliki
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal seperti yang diharapkan.

#### **Peluang (Opportunity)**

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan anggaran untuk pengembangan RSUD.
2. Adanya Program Nasional JKN dan BPJS Kesehatan.
3. Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand).
4. RSUD Ratu Aji Putri Botung sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan memiliki lokasi yang mudah dicapai.
5. Banyaknya perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menambah penerimaan lain-lain Rumah sakit yang nantinya akan memperbaiki layanan Rumah Sakit.
6. Mencari kerja sama dengan pihak ketiga dan meningkatkan pelayanan MCU untuk mendapatkan pendapatan bagi Rumah Sakit

#### **Tantangan (Threat)**

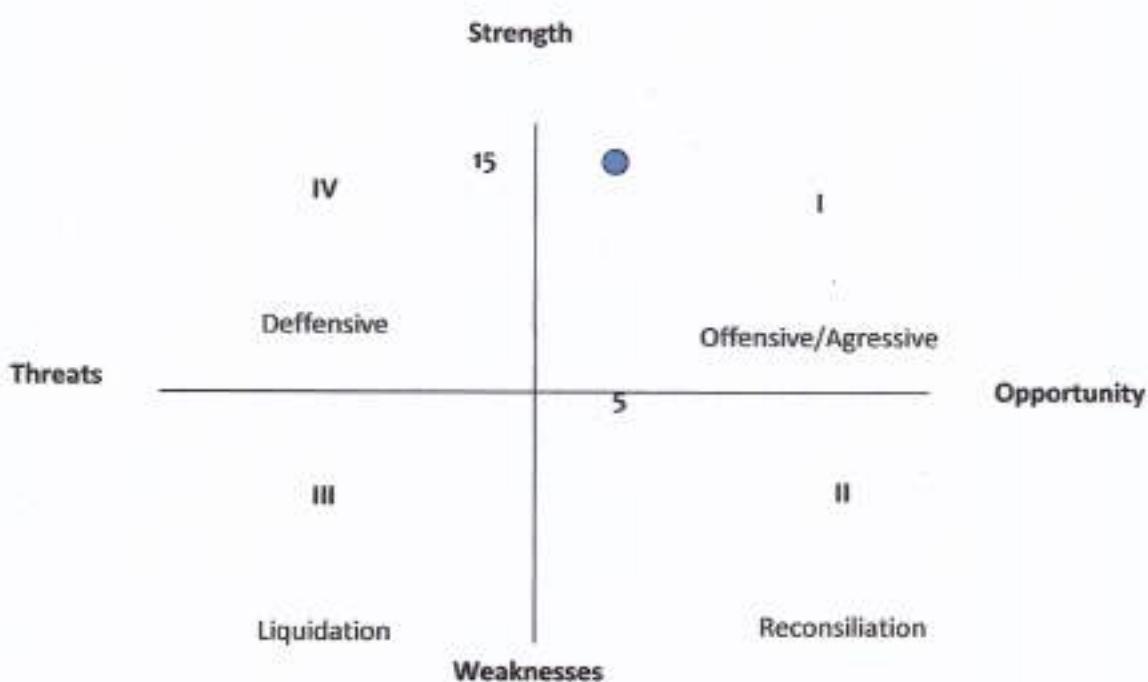
1. Kebijakan pemerintah tentang program penghapusan Jamkesda dan menyatunya dalam program JKN.
2. Era pasar bebas Asia Tenggara dan China (Asean China Free Trade Area = ACFTA), masuknya modal dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat.
4. Masyarakat semakin kritis terhadap perubahan pelayanan yang ada, yang menginginkan adanya pembenahan setiap waktu.
5. Munculnya Klinik Swasta di daerah PPU dan sekitarnya yang merupakan pesaing dan cenderung meningkat.
6. Implementasi BLUD belum optimal.
7. Undang-undang Perlindungan konsumen.
8. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri





9. Mempertahankan Status Akreditasi yang telah diraih yakni Paripurna
10. Ditetapkannya Sebagian wilayah penajam paser utara sebagai Ibukota Negara

**Hasil Analisis Lingkungan Bisnis :**



Dari analisis SWOT dapat disimpulkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana khususnya perlunya bangunan baru seperti Bangunan Rawat inap Kelas I,II, VIP, Rawat Jalan, Gudang arsip, Gudang Obat, Rumah Dinas, Gedung workshop, dan beberapa ruang lainnya seperti Laundry, Gizi/Dapur, Ruang Sanitasi hal ini disebabkan jumlah kunjungan semakin banyak dan jumlah dokter spesalistik semakin bertambah.
2. Masih perlunya perluasan area parkir seiring semakin bertambahnya jumlah kunjungan ke RS
3. Beberapa pelayanan masih ada yang dilaksanakan dibawah standar yang ada karena belum sesuai SOP pelayanan
4. SDM yang ada masih belum semuanya bisa memenuhi standar kepegawaian dan menjadi standar tersebut sebagai budaya kerja, sehingga belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan profesional pelayanan berbasis pada kepuasan pelanggan.
5. Anggaran yang ada masih terpusat berdasarkan skala prioritas
6. Masih minimnya kamar pelayanan yang dimiliki





7. Pemeliharaan sarana dan prasarana masih belum optimal seperti yang diharapkan.
8. Ditetapkannya Sebagian wilayah penajam paser utara sebagai Ibukota Negara sehingga perlu menangkap peluang peningkatan jumlah kunjungan.

Berdasarkan kondisi obyektif dan beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yakni :

- a. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang adil dan inklusif melalui pembangunan manusia berkualitas, produktif dan berdaya saing.
- b. Optimalisasi tata Kelola pemerintah berbasis teknologi informasi.





## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran RSUD Ratu Aji Putri Botung

Melihat dari Isu strategis yang termuat pada BAB III, maka Tujuan dan Sasaran dari RENSTRA RSUD Ratu Aji Putri Botung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan standar tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Sasaran dari RENSTRA RSUD Ratu Aji Putri Botung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul

Adapun gambaran Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran adalah sebagai berikut pada matriks (*pada halaman berikut*):

Tabel. 6  
Isu strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit
Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.	Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rata-rata capaian Sakip	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Indeks Kepuasan Layanan RSUD (IKM)





## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA SKPD. Strategi disusun dengan tetap melihat faktor-faktor kekuatan, kelemahan dari sumber internal, serta Faktor Peluang dan ancaman yang bersumber dari eksternal. Faktor tersebut dianalisa dengan pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, and Treath) yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan dan sasaran.

**Tabel 7**  
Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan	Memaksimalkan penerapan SPM dan memanfaatkan seluruh Sumber Daya yang ada untuk penuhan SPA (Sarana Prasarana dan Alkes)
Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.	Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rata-rata capaian Sakip	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Indeks Kepuasan Layanan RSUD (IKM)	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan BLUD





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan program prioritas pembangunan dan kegiatannya khususnya bidang kesehatan. Program prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Rincian program dan kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan dibawah ini :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayana Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota:
    - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
    - Pengembangan Rumah Sakit
    - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Pemeliharaan rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Pengadaan Bahan Habis Pakai
  - b. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota
    - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
  - a. Kegiatan : Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota
    - Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - b. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya





- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan bahan/Material
  - Fasilitas kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan : Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
  - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- f. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
  - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Rencana strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan yang ingin dicapai.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, serta Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam (*lampiran*).





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Perumusan indikator kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ratu Aji Putri Botung. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan ditetapkannya SPM bidang rumah sakit adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
- b. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat;
- c. Telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa di RSUD Ratu Aji Putri Botung melaksanakan jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan gawat darurat
- b. Pelayanan Rawat Jalan
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Rekam Medik
- e. Pelayanan Masyarakat Miskin





- a. Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatalogi dan KB
- b. Pelayanan radiologi
- c. Pelayanan Gizi
- d. Pelayanan Farmasi
- e. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- f. Pelayanan Fisioterapi
- g. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
- h. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS
- i. Pelayanan Pengelolaan Limbah
- j. Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

**Tabel.8**  
**Indikator Kinerja Utama RSUD Ratu Aji Putri Botung**

Indikator	Tujuan	Basisan	Output	Outcomes	Indikator	RSU	Target		
							2024	2026	2028
Peningkatan Pemerintahan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas hidup dan daya saing SDM	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Sesuai Standar Kesehatan	Sertifikasi Akreditasi oleh KARS	Tersakreditasinya Rumah Sakit	Tingkat / Level Akreditasi RS	Paripurna (Bintang 5)/Menyertifikasi Level	Paripurna (Bintang 5)/Mempertahankan Level	Paripurna (Bintang 5)/Mempertahankan Level
Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Pelayanan Bimbingan Sesuai Standar	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan di RS	Indeks Kepuasan Layanan RSUD (IKL)	Capatan IKL	80%	90%	100%

Saat ini sedang dalam proses revisi Peraturan Bupati Penajam Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dari 15 Jenis pelayanan menjadi 21 Jenis Pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu : tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.





Banyak indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelayanan Rumah Sakit, yang paling sering digunakan adalah : BOR, LOS, BTO, TOI, NDR, GDR.

**Tabel.9**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) RSUD Ratu Aji Putri Botung**

No:	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun(2023)	Target RENSTRA RSUD RAPB Tahun Ke-			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun(2026)
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		
1	<i>Kunjungan rawat jalan</i>	27,921	26,000	27,900	28,150	29,000
2	<i>Kunjungan IGD</i>	10,903	11,000	11,450	11,700	12,500
3	<i>Kunjungan rawat inap</i>	4,604	6,000	6,300	6,350	6,500
4	<i>Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit :</i>					
	- BOR ( Bed Occupancy Rate )	33.71	60	65	70	73
	- LOS (Length Of Stay)	2.44	6	6	6	7
	- TOI (Turn Over Interval)	4.73	3	3	2	1
	- BTO (Bed Turn Over)	51.16	40	50	50	45
	- NDR (Net Death Rate)	7.82	7	5	4	3
	- GDR (Gross Death Rate)	15.42	12	12	10	10





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya "Renstra SKPD RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara tahun 2024- 2026" . Renstra ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 khusunya kebijakan bidang kesehatan, disamping menyesuaikan agenda program Provinsi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya RSUD Penajam Paser Utara dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, berlangsung pesat.

Rencana Strategis RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kesehatan untuk periode 5(lima) tahun, yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat visi, misi , tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang diampuh oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini adalah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal Strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah bahwa Renstra RSUD Ratu Aji Putri Botung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan RKA RSUD Ratu Aji Putri Botung serta digunakan untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan yang diampuh oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung dan/tau kinerja sasaran RSUD Ratu Aji Putri Botung .

Akhirnya komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra bekerja ini.



KLASIFIKASI, KODETIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA 2024-2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL
						Rp.	Rp.	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp 352,000,000	Rp 387,200,000	Rp 425,920,000	Rp 1,165,120,000
				Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pakaian KORPRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							Rp -
				Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	Rp 8,505,000,000	Rp 9,355,500,000	Rp 10,291,050,000	Rp 28,151,550,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Rp 327,885,393	Rp 360,673,932	Rp 396,741,326	Rp 1,085,300,651
								Rp -
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 205,170,712	Rp 225,687,783	Rp 248,256,561	Rp 679,115,056
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp 52,849,368	Rp 58,134,305	Rp 63,947,735	Rp 174,931,408
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Rp 53,281,998	Rp 58,610,198	Rp 64,471,218	Rp 176,363,413
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Rp 89,271,828	Rp 98,199,010	Rp 108,018,912	Rp 295,489,750
								Rp -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp 367,322,349	Rp 404,054,584	Rp 444,460,042	Rp 1,215,836,975
								Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL Rp.
						Rp.	Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 430,801,149	Rp 473,881,264	Rp 521,269,390	Rp 1,425,951,803
			Penyediaan bahan/Material	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
			Fasilitas kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 660,000,000	Rp 726,000,000	Rp 798,600,000	Rp 2,184,600,000
				Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 420,475,000	Rp 462,522,500	Rp 508,774,750	Rp 1,391,772,250
								Rp -
			Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Pengadaan Barang Milik daerah	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Modal Mebel	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL
					Rp.			Rp.
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Paket/Pengiriman	Rp 33,000,000	Rp 36,300,000	Rp 39,930,000	Rp 109,230,000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Rp 11,000,000	Rp 12,100,000	Rp 13,310,000	Rp 36,410,000
				Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 11,330,000	Rp 12,463,000	Rp 13,709,300	Rp 37,502,300
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	Rp 68,640,000	Rp 75,504,000	Rp 83,054,400	Rp 227,198,400
				Belanja Tagihan Air	Rp 425,425,000	Rp 467,967,500	Rp 514,764,250	Rp 1,408,156,750
				Belanja Tagihan Listrik	Rp 3,362,792,690	Rp 3,699,071,959	Rp 4,068,979,155	Rp 11,130,843,805
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp 44,000,000	Rp 48,400,000	Rp 53,240,000	Rp 145,640,000
				Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 68,640,000	Rp 75,504,000	Rp 83,054,400	Rp 227,198,400
				Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Rp 236,500,000	Rp 260,150,000	Rp 286,165,000	Rp 782,815,000
				Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 12,660,120,000	Rp 13,926,132,000	Rp 15,318,745,200	Rp 41,904,997,200
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 457,889,740	Rp 503,678,714	Rp 554,046,585	Rp 1,515,615,039
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL
					Rp.	Rp.	Rp.	
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Rp 203,280,000	Rp 223,608,000	Rp 245,968,800	Rp 672,856,800
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	Rp 413,000,500	Rp 454,300,550	Rp 499,730,605	Rp 1,367,031,655
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	Rp 165,000,000	Rp 181,500,000	Rp 199,650,000	Rp 546,150,000
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Dapur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran	Rp 55,000,000	Rp 60,500,000	Rp 66,550,000	Rp 182,050,000
				Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Lainnya	Rp 22,000,000	Rp 24,200,000	Rp 26,620,000	Rp 72,820,000
								Rp -
	PROGRAM PEMENUHAN	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
		Pengadaan Bahan Habis pakai		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 456,500,000	Rp 502,150,000	Rp 552,365,000	Rp 1,511,015,000
				Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp 1,100,000,000	Rp 1,210,000,000	Rp 1,331,000,000	Rp 3,641,000,000
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 398,664,885	Rp 438,531,374	Rp 482,384,511	Rp 1,319,580,770
								Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL Rp.
					Rp.	Rp.	Rp.	
2	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Rujukan)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								Rp -
				Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
				Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (THL Kesehatan)	Rp 16,800,000,000	Rp 18,480,000,000	Rp 20,328,000,000	Rp 55,608,000,000
								Rp -

Penajam, 12 Januari 2023

Kasubbag Umum & Kepegawaian



Elia Mawarni, SE  
NIP. 19810504 200701 2 011

## KLASIFIKASI, KODETIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA 2024-2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL
						Rp.	Rp.	Rp.
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perryediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200,000,000,000.00	7,000,000,000.00	1,000,000,000.00	208,000,000,000.00
				Gedung 4 Lantai	Gudang Arsip dan Gudang Obat	Workshop IPSRS		
			Pengembangan RS	Belanja Modal Bengunan Gedung Kantor	2,628,777,000.00	-	-	2,628,777,000.00
				Laundry dan Dapur				
			Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	14,138,088,244.50	30,000,000,000.00	33,000,000,000.00	77,138,088,244.50
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	129,624,000.00	142,586,400.00	156,845,040.00	429,055,440.00
				Kalibrasi				

Penajam, 12 Januari 2023  
Kasi Penunjang Medik

  
Wawan Suharsono, S.Kom  
NIP. 19761104 201001 1 005

KLASIFIKASI, KODETIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA 2024-2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN KODE REKENING	2024	2025	2026	TOTAL Rp.
					Rp.	Rp.	Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17,868,124,550.08	20,012,299,496.09	22,413,775,435.62	60,294,199,481.79
				TPP ASN	25,490,638,583.20	28,549,515,213.18	31,975,457,038.77	86,015,610,835.15
					43,358,763,133.28	48,561,814,709.27	54,389,232,474.39	146,309,810,316.94
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474,012,000.00	521,413,200.00	573,554,520.00	1,568,979,720.00
				Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				
					474,012,000.00	521,413,200.00	573,554,520.00	1,568,979,720.00
				Belanja Pegawai BLUD	2,982,367,440.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	9,982,367,440.00
				Belanja Barang dan Jasa BLUD	30,644,557,119.00	34,000,000,000.00	34,000,000,000.00	98,644,557,119.00
				Belanja Modal BLUD	1,373,075,441.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	6,373,075,441.00
					35,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	115,000,000,000.00
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Rujukan)	630,986,440.00	694,085,084.00	763,493,592.40	2,088,565,116.40
					630,986,440.00	694,085,084.00	763,493,592.40	2,088,565,116.40

Penajam, 12 Januari 2023  
Kassubag Keuangan

H. Muhammad Misalini, ST  
NIP. 19750905 200003 1 007

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penilaian Pelanggaran Dinas Bantuan Sosial Untuk Dusun  
 Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun 2024 - 2026

Tajuk	Sumber	Indikator Kunci	Bidang Urusan Pembentukan dan Program Prioritas Penilaian	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kunci Kegiatan, Subsatu, Program (kontinuitas dan Kegiatan terintegrasi)	Dasar Capaian pada Tahap Awal Penilaian	Target Kinerja Program dan Kriteria Penilaian						Kandili Kinerja pada siklus periode Bantuan Penanggulangan Bencana		P2 Sumber	P3 Tahap		
								2024		2025		2026							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatkan Kualitas Kehidupan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya Bantuan Sosial	URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PENENGAHAN UPAYA KESERAKHATAN PERDAMAN DAN UPAYA KEREGATAN MASYARAKAT		Penilaian Capaian BPMN RS	75%	80%	215,482,649,500,00	95%	30,397,352,358,00	95%	37,286,088,142,40	100%	37,286,088,142,40	RS - Kab.PPU			
		Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Kewirausahaan Dusun				Terwujudnya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Kewirausahaan Dusun		118,851,634,129,50		39,293,167,774,00		36,521,594,551,00		36,521,594,551,00	RS - Kab.PPU				
		Peningkatan 8.5 bersama Serama dan Peningkatan Pendukungnya		Tersedianya Gedung RS	1 Unit/8.5	1 Unit	300,000,000,00	2 Unit	7,000,000,000,00	1 Unit	1,000,000,000,00	4 Unit	1,000,000,000,00	RS - Kab.PPU					
		Peningkatan RS	Tersedianya Status Peralihan RS	1 Paket	2 Paket	2,628,777,600,00	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	33,000,000,000,00	3 Paket	33,000,000,000,00	RS - Kab.PPU				
		Peningkatan Alat Kesehatan/Alat Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan	1 Paket	1 Paket	14,136,000,244,50	1 Paket	30,000,000,000,00	1 Paket	33,000,000,000,00	1 Paket	33,000,000,000,00	3 Paket	33,000,000,000,00	RS - Kab.PPU				
		Peningkatan Bahan Habis pakai	Tersedianya ADIP Kehidupan	1 Paket	3 Paket	1,155,164,885,00	3 Paket	2,130,681,374,00	3 Paket	2,385,740,311,00	3 Paket	2,385,740,311,00	3 Paket	2,385,740,311,00	RS - Kab.PPU				
		Terkelola pelayanan Kesehatan efektif				Tersedianya Pelayanan Kesehatan Terintegrasi Layanan		690,986,440,00		694,085,684,00		701,807,269,40		701,807,269,40		701,807,269,40	RS - Kab.PPU		

		Pengelolaan Upaya Kesehatan Keluarga	Jumlah Rajutan Positif	310 Positif	490 Positif	0,50,986,140,00	490 Positif	894,185,064,00	495 Positif	793,483,392,40	810 Positif	781,483,997,40	RS	Kab.PPU
Terakreditasi Bunsi Sabtu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESЕHATAN	Terselenggara SDM berstandar untuk Standar	136 Orang	136 Orang	16,880,000,000,00	145 Orang	16,480,000,000,00	146 Orang	20,325,000,000,00	145 Orang	20,325,000,000,00	RS	Kab.PPU	
II	Peningkatan Kebutuhan dan Peningkatan SDM Kesehatan untuk UKP dan UGM di wilayah Kab/Kota	Tujuannya Peningkatan SDM Kas			16,880,000,000,00		16,480,000,000,00		20,325,000,000,00		20,325,000,000,00	RS	Kab.PPU	
		Peningkatan SDM Kesehatan untuk Standar	Jumlah SDM Kas dari Gaji SDM Kas	136 Orang	136 Orang	16,880,000,000,00	145 Orang	16,480,000,000,00	160 Orang	20,325,000,000,00	160 Orang	20,325,000,000,00	RS	Kab.PPU
	Indeks Kapasitas Layanan RSUD (IKSL)	PROGRAM PENUNJANG URAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	70%	70%	133,216,575,225,00	80%	120,700,936,599,25	90%	126,233,698,914,00	90%	134,518,680,914,69	RS	Kab.PPU
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33,831,775,133,25		49,083,227,934,21		54,942,786,204,39		54,942,786,204,39	RS	Kab.PPU
		Penyaduran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	396 orang	312 orang	43,326,763,133,25	396 Orang	48,561,814,709,21	396 Orang	54,389,231,074,39	396 Orang	54,389,231,074,39	RS	Kab.PPU
		Penyaduran Administrasi Pihakweise Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyaduran administrasi pihakweise tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	474,012,000,00	12 Dokumen	521,032,000,00	12 Dokumen	573,354,500,00	12 Dokumen	573,354,500,00	RS	Kab.PPU
	Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah			8,857,000,000,00		9,742,700,000,00		10,716,870,000,00		10,716,870,000,00	RS	Kab.PPU
		Pengadaan Peralatan Dinas Bantuan Alatkes Kelengkapannya	Jumlah peralatan jalinan dan bantuan alatkes kelengkapan	308 Orang	600 orang	352,000,000,00	650 Orang	381,200,000,00	679 Orang	425,920,000,00	679 Orang	425,920,000,00	RS	Kab.PPU
		Pembuktian dan Pidakhan Pegawai Berhonorat Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengelati pidakhan	200 Orang	600 orang	8,200,000,000,00	650 Orang	9,355,500,000,00	670 Orang	10,281,000,000,00	670 Orang	10,281,000,000,00	RS	Kab.PPU
	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,697,937,797,00		2,697,763,579,00		3,127,939,934,00		3,127,939,934,00	RS	Kab.PPU
		Penyekatan Kepemimpinan Jatah Listrik/Penerangan Bangunan Kasar	Jumlah paket lengkapnya jatah listrik/penerangan bangunan listrik yang disebutkan	1 Paket	1 Paket	377,085,393,00	1 Paket	360,075,832,00	1 Paket	369,741,326,00	1 Paket	369,741,326,00	RS	Kab.PPU

Meningkatkan standar serta kela kala penyelemparan dan penurutan dan pengamanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kabila Peneritian Yang Unggul	Penyedian Perbaikan dan Pengelolaan Kantor	Jumlah paket perbaikan dan pengeloporan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	400,473,896.00	1 Paket	AB,631,296.00	1 Paket	482,604,626.00	3 Paket	111,694,126.00	RS	Kab.PPU		
				Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	367,322,349.00	1 Paket	484,054,584.00	1 Paket	444,460,042.00	3 Paket	Kab.PPU		
				Perbaikan Bangun Cata dan Penggarisan	Jumlah paket barang bangunan dan penggarisan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	490,801,199.00	1 Paket	473,881,364.00	1 Paket	521,268,390.00	3 Paket	Kab.PPU		
				Perbaikan Sifat/Material	Jumlah paket bahan dan Material	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	RS	Kab.PPU	
				Facilitas Umum Tata Kota	Jumlah Kegiatan Tata Kota	1 Paket	1 Paket	000,000,000.00	1 Paket	726,000,980.00	1 Paket	798,000,900.00	3 Paket	798,000,900.00	RS	Kab.PPU
				Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah laporan perbaikan dan peningkatan kantor yang disediakan	351 Laporan	35 Laporan	429,475,000.00	35 Laporan	462,522,900.00	35 Laporan	506,776,196.00	35 Laporan	550,657,225.00	RS	Kab.PPU
				Penyelesaian Urusan Pemerintah Daerah	Telah selesai Penyelesaian Urusan Pemerintah Daerah			17,328,447,004.40		18,081,292,439.44		20,987,621,703.36		20,967,421,703.36	RS	Kab.PPU
				Penyedian Jasa Pengujian Uraian Pemerintah Daerah												
				Penyedian Jasa Bantuan Masyarakat	Jumlah laporan penyedian jasa kemasyarakatan jumlah daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55,333,000.00	12 Laporan	80,893,000.00	12 Laporan	85,349,200.00	12 Laporan	71,644,230.00	RS	Kab.PPU
				Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	3,855,837,690.40	36 Laporan	4,242,543,459.44	36 Laporan	4,991,797,813.38	36 Laporan	5,333,477,583.82	RS	Kab.PPU
				Penyedian Jasa Pembangunan dan Pengeloporan kantor	Jumlah laporan penyedian jasa pembangunan dan pengeloporan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	112,640,000.00	12 Laporan	125,901,480.00	12 Laporan	136,298,400.00	12 Laporan	140,023,540.00	RS	Kab.PPU
				Penyedian Jasa Pengejalan Kantor	Jumlah laporan penyedian jasa pengejalan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,101,026,000.00	12 Laporan	14,035,925,000.00	12 Laporan	16,087,348,200.00	12 Laporan	17,767,118,220.00	RS	Kab.PPU
				Penyelesaian Urusan Pemerintah Daerah	Orilisasi Penyelesaian Urusan Pemerintah Daerah			3,071,094,024.40		3,064,972,614.84		6,913,962,280.92		6,243,962,280.92	RS	Kab.PPU

			Penyekaman dan Penelitianan, Biaya Penelitianan, dan Pajak Kendaraan Peribadi Dinas atau Kondesaan Dinas Jalan	Jumlah kendaraan peninggaran dinas dan kendaraan dinas jalan yang dipajak dan dilanjutkan piagamnya	68 Unit RS	68 Unit RS	457,899,700.00	70 Unit RS	303,878,714.00	72 Unit RS	351,946,385.80	72 Unit RS	609,131,243.50	RS	Kab.PPU
			Pembentukan/Telahditasi Genggat Kantor dan Bengkulu Lantai	Jumlah genggat kantornya dan bangunan lantai yang dipajak	1 Unit RS	1 Unit RS	3,233,804,884.80	1 Unit RS	4,301,293,900.84	1 Unit RS	5,080,915,605.92	1 Unit RS	6,388,807,355.52	RS	Kab.PPU
Terlaksananya pengelolaan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD		Telahlaksananya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Persejiring Pelayanan			35,000,000,000.00		40,000,000,000.00		40,000,000,000.00		40,000,000,000.00	RS	Kab.PPU
			Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Telahlaksananya Pengelolaan BLUD RS	38,460 Pasien	40,000 Pasien	35,000,000,000.00	42,000 Pasien	40,000,000,000.00	45,000 Pasien	40,000,000,000.00	45,000 Pasien	44,000,000,000.00	RS	Kab.PPU

  
 Samarinda, 12 Januari 2022  
 Diatas BLUD Kab. PPU  
 dr. Lukasrian Eddy Saputra  
 Nip. 19780311 200302 1 002

## LAMPIRAN II

**ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026**

## PERANGKAT DAERAH:

Isu Strategis:							
1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing. 2. Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.							
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terakreditasi nya Rumah Sakit	Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan	Memaksimalkan penerapan SPM dan memanfaatkan seluruh Sumber Daya yang ada untuk pemenuhan SPA (Sarana Prasarana dan Alkes)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan sesuai standar
Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rata-rata capaian Sakip	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Indeks Kepuasan Layanan RSUD (IKM)	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan BLUD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS (target 80%)

Penajam, 12 Januari 2023  
dr. Lukasliwan Eddy Saputro

dr. Lukasliwan Eddy Saputro

NIP. 19780311 200502 1 005

## Catatan:

- Strategi Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026 bersifat tetap setiap tahunnya, sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembangunan

LAMPIRAN III

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah		
						2024		2025		2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1		Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelajaran Dasar													
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan													
1	01	01	xx	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	%	70%	111,316,975,225.08	80%	125,759,956,559.55	90%	136,318,680,914.69	90%	RSUD
1	02	02	xx	xx	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	%	78%	219,482,640,569.50	90%	39,987,352,858.00	90%	37,286,088,143.40	100%	RSUD
1	02	03	xx	xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Kesehatan	Tersedianya SDM kesehatan sesuai standar	Orang	136 Orang	136 Orang	145 orang	18,480,000,000.00	160 Orang	20,328,000,000.00	160 Orang	RSUD

Pekanjam, 12 Januari 2023

dr. Lukasiwan Eddy Saputro

NIP. 19780311 200502 1 005

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan kode SKPD

Kolom (2) diisi dengan Bidang Urusan Pemerintah yang dibidangi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan isian Rencana Program yang akan dilaksanakan

Kolom (3) diisi dengan indikator program yang direncanakan (indikator bersifat kuantitatif yang dapat diukur)

Kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator yang ditetapkan

Kolom (5) diisi dengan capaian terakhir (tahun 2022) dari indikator program yang ditetapkan

Kolom (6), (8), (10) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya (umumnya menunjukkan kondisi yang semakin baik setiap tahunnya) berdasarkan indikator dan satuan yang ditetapkan

Kolom (7), (9), (11) diisi dengan rencana pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan mencapai target dari program yang direncanakan

Kolom (12) diisi dengan akumulasi target kinerja yang ditetapkan

Kolom (13) diisi nama Perangkat Daerah

Indikator	Tujuan	Bantuan	Output	Outcome	Indikator	KCI	Target			Strategi	Aksi Kritisik	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026			
							2024	2025	2026			Detail Program	Indikator Program	Target	Detail Page (Rp)	Detail Program	Indikator Program	Target	Detail Page (Rp)	Detail Program	Indikator Program	Target	Detail Page (Rp)
Peningkatan Pengetahuan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Masyarakat Berdaya, dan Berkarakter	Peningkatan Kualitas hidup dan daya saing SDM	Peningkatan Kualitas Kendaraan	Pelajaran Sosial Berdasarkan Kewirausahaan	Vertikalisasi Akreditasi dari NARS	Teknologi dan Inovasi	Tingkat / Level Akreditasi RS	Pengaruh (Banting S/ Mempengaruhi Indeks Level)	Pengaruh (Banting S/ Mempengaruhi Indeks Level)	Pengaruh (Banting S/ Mempengaruhi Indeks Level)	Peningkatan Kualitas Kendaraan berdaya	Minimalkan penyaluran RPK dan mewujudkan masyarakat berdaya yang adil, inklusif dan berkarakter	PROGRAM PENEMILIHAN UTAMA KESEHATAN PEDIATRIK DAN USPAYA KEMERDEKAAN MASYARAKAT	Percentase Capaian RPK	80%	319,452,540,000,00	PROGRAM PENEMILIHAN UTAMA KESEHATAN PERORANGAN DAN UTAMA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Capaian RPK RS (target 90%)	80%	39,987,352,258,00	PROGRAM PENERJAHAN UTAMA KESEHATAN PERORANGAN DAN UTAMA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Capaian RPK RS (target 90%)	80%	37,398,088,343,40
Optimalisasi mekanisme pemerintahan berbasis transaksi informasi	Menyajikan informasi mekanisme pemerintahan berbasis transaksi informasi	Pengaruh Struktural Berdasarkan Standar	Pelajaran Sosial Berdasarkan Kewirausahaan	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah di RS	Indeks Kepatuhan Layanan RSUD (RS)	Capaian 80%	80%	90%	100%	Mencapai Indeks kepatuhan yang standar dan transparan	Eksternal dan Ekstensif Pengelolaan BLUD	PROGRAM PENULILAH LITERASI PENERJAHAN DAERAH MASYARAKAT/K UTA	Percentase Capaian Indeks Publik di RS	70%	111,316,072,000,00	PROGRAM PENULILAH LITERASI PENERJAHAN DAERAH MASYARAKAT/K UTA	Percentase Capaian Indeks Publik di RS (target 80%)	80%	125,759,906,000,00	PROGRAM PENERJAHAN UTAMA PENERJAHAN DAERAH MASYARAKAT/K UTA	Percentase Capaian Layanan Publik di RS (target 90%)	80%	136,818,080,014,00

Pengajuan, 12 Januari 2023

Direktur RSUD RAPP

dr. Lukaswan Eddy Saputro

NIP. 19780311 200502 1 005

Indikator	Output	Outcome	Indikator	Strategi	Alokasi Bantuan	Tahun 2016				Tahun 2018				Tahun 2020				
						Bentuk Permenkes No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Detail Peng (Rp)	Bentuk Permenkes No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Detail Peng (Rp)	Bentuk Permenkes No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Detail Peng (Rp)	
Peningkatan Pemerintahan Kesejahteraan Sosial yang Afil dan Industri Moladi Penitiguanan Mernia Berkaitan, Protaktif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Pelayanan Sosial Standar Kesehatan	Sertifikasi Akreditasi oleh KARS	Tersedianas nya Komisi Salit	Peningkatan Pengetahuan Kesehatan seua standar	PROGRAM PEMEMUH UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS	80%	*****	PROGRAM PEMEMUH UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS (target 90%)	90%	30,987,352,658,00	PROGRAM PEMEMUH UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM RS (target 100%)	90%	37,286,088,183,40
						Melakukan upaya Peningkatan Kesehatan seua standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	Tersedianya SDM kesehatan seua standar	136 Orang	16,840,000,000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	Tersedianya SDM kesehatan seua standar juga	146 orang	16,480,000,000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	Tersedianya SDM kesehatan seua standar juga	165 orang	20,326,000,000,00
Optimalisasi mekanisme pemerintahan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan standar tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Pengawas berkrediat yang efektif dan efisien	Meningkatkan kepatuhan dan transparansi pemerintahan terhadap pelayanan di RS	Indeks Kepatuhan Layanan RSUD (IKL)	Indeks Kepatuhan dan transparansi pemerintahan terhadap pelayanan di RS	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAH DAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	70%	*****	PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAH DAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS (target 80%)	80%	125,739,956,559,53	PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAH DAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS (target 90%)	90%	136,318,680,914,69

Pengajuan, 12 Januari 2023

○ Direktur RSUD-RAPB

dr. Lukasiwan Eddy Saputro

NIP. 19780311 200502 1 005

Indikator	Output	Outcomes	Tujuan	Sumber	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026					
						Uraian Program (Berasal Permenkabag Keu. No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Uraian Anggaran (Rp)	Uraian Program (Berasal Permenkabag Keu. No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Uraian Anggaran (Rp)	Uraian Program (Berasal Permenkabag Keu. No. 90 Th. 2019)	Indikator Program	Target	Uraian Anggaran (Rp)
Peningkatan Pemerintahan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pengembangan Masyarakat, Produktif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Pelayanan Sosial Standar Kesehatan	Bertitikasi Akreditasi oleh KARS	Tersertifikasi dan Ramah Sekolah	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESELAMATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESAKITAN MASYARAKAT	Persentase Capaian BPN RS	80%	219,482,040,595,50	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESELAMATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESAKITAN MASYARAKAT	Persentase Capaian BPN RS target 90%	90%	39,987,352,838,00	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESELAMATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESAKITAN MASYARAKAT	Persentase Capaian BPN RS target 100%	90%	37,286,088,143,40
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESAKITAN	Tersertifikasi SDM kesehatan sesuai standar	136 Orang	16,800,000,000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESAKITAN	Tersertifikasi SDM kesehatan sesuai standar	145 orang	18,480,000,000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESAKITAN	Tersertifikasi SDM kesehatan sesuai standar	140 Orang	20,328,000,000,00
Optimalisasi tindaklanjut pemerintahan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerimahannya	Pengurusan berdasarkan standar	Pelayanan berdasarkan standar	Meningkatnya kepercepatan responsibilitas terhadap pelaksanaan di RS	Indeks Kepuasan Layanan RSUD HKM	PROGRAM PENULISAN UKURAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS	70%	111,316,975,225,08	PROGRAM PENULISAN UKURAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS (target 80%)	80%	125,739,356,559,55	PROGRAM PENULISAN UKURAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Publik di RS target 90%	90%	136,318,680,914,69

Pengejaman, 12 Januari 2023

↓ Direktur RSUD RAPB ↴

dr. Lukasliwan Eddy Saputro  
NIP. 19780311 200502 1 005